

# DINAMIKA POLITIK INDONESIA KONTEMPORER DAN TANTANGAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DI ERA DIGITAL

Abu Rizal Bakri<sup>1</sup>, Adi Iqbal<sup>2</sup>, Ahmad Syukri<sup>3</sup>

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[aburizalbakri@gmail.com](mailto:aburizalbakri@gmail.com)<sup>1</sup>, [adiiqbal@uinjambi.ac.id](mailto:adiiqbal@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>, [ahmadsyukri@uinjambi.ac.id](mailto:ahmadsyukri@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik Indonesia kontemporer. Ruang digital menjadi arena utama komunikasi dan kontestasi politik yang memengaruhi pola partisipasi masyarakat, pembentukan opini publik, serta praktik demokrasi. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang bagi perluasan partisipasi politik dan akses informasi yang lebih inklusif. Namun, di sisi lain, fenomena disinformasi, polarisasi politik, dan degradasi kualitas diskursus publik menimbulkan tantangan serius bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik Indonesia kontemporer serta mengkaji tantangan konsolidasi demokrasi di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersumber dari buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, serta pemberitaan media yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi politik berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi politik masyarakat, tetapi sekaligus memicu polarisasi sosial dan melemahnya rasionalitas diskursus demokratis. Selain itu, institusi politik dan regulasi negara belum sepenuhnya adaptif dalam menghadapi tantangan politik digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia memerlukan pengelolaan ruang digital yang lebih etis, penguatan literasi digital masyarakat, serta komitmen aktor politik terhadap nilai-nilai demokrasi substantif

**Kata Kunci:** Politik Kontemporer, Demokrasi Digital, Konsolidasi Demokrasi, Digitalisasi Politik.

**Abstract:** *The development of digital technology has brought significant changes to the dynamics of contemporary Indonesian politics. Digital spaces have become the primary arena for political communication and contestation, influencing patterns of public participation, the formation of public opinion, and democratic practices. On the one hand, digitalization creates opportunities for broader political participation and more inclusive access to information. On the other hand, phenomena such as disinformation, political polarization, and the degradation of public discourse pose serious challenges to the process of democratic consolidation in Indonesia. This study aims to analyze the dynamics of contemporary Indonesian politics and examine the challenges of democratic consolidation in the digital era. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through library research and documentation, drawing on books, scholarly journal articles, policy documents, and relevant media reports. Data analysis was conducted qualitatively using an interpretative approach. The findings indicate that political digitalization contributes to increased public political participation while simultaneously intensifying social polarization and weakening the rationality of democratic discourse. Furthermore, political institutions and state regulations have not yet fully adapted to the challenges posed by digital politics. This study concludes that democratic consolidation in Indonesia requires more ethical governance of digital spaces, strengthened digital literacy among citizens, and a strong commitment by political actors to substantive democratic values*

**Keywords:** *Contemporary Politics, Digital Democracy, Democratic Consolidation, Political Digitalization.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Di bidang politik, digitalisasi tidak hanya mengubah pola komunikasi antara negara dan warga negara, tetapi juga memengaruhi cara aktor politik membangun legitimasi, menyampaikan gagasan, serta menggalang dukungan publik. Indonesia sebagai negara demokrasi dengan tingkat penetrasi internet dan penggunaan media sosial yang tinggi menghadapi dinamika politik baru yang kompleks dan multidimensional. Transformasi digital tersebut turut membentuk wajah politik kontemporer Indonesia, baik dalam proses elektoral, partisipasi politik masyarakat, maupun dalam

pembentukan opini publik.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi digital telah menjadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam membentuk lanskap politik global pada abad ke-21. Digitalisasi tidak hanya merevolusi cara individu berkomunikasi, tetapi juga mentransformasi hubungan antara negara, aktor politik, dan warga negara.<sup>2</sup> Di Indonesia, kemajuan teknologi informasi yang ditandai dengan meningkatnya penetrasi internet dan masifnya penggunaan media sosial telah menciptakan ruang politik baru yang bersifat terbuka, cepat, dan lintas batas. Ruang digital tersebut menjadi arena penting dalam pertarungan ide, kepentingan, dan kekuasaan, sekaligus membentuk dinamika politik kontemporer yang semakin kompleks.<sup>3</sup>

Dalam konteks demokrasi, kehadiran ruang digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, media digital memperluas akses informasi politik, mendorong partisipasi warga negara, serta membuka ruang deliberasi publik yang lebih inklusif. Di sisi lain, digitalisasi politik juga memunculkan persoalan serius seperti maraknya disinformasi dan hoaks, polarisasi politik berbasis identitas, manipulasi opini publik, serta melemahnya rasionalitas dalam diskursus demokrasi. Fenomena ini berpotensi menghambat proses konsolidasi demokrasi yang menuntut stabilitas institusi, kepercayaan publik, dan budaya politik yang demokratis.<sup>4</sup>

Konsolidasi demokrasi merupakan tahap penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca-reformasi. Tahap ini tidak hanya diukur dari keberlangsungan pemilu yang rutin dan kompetitif, tetapi juga dari menguatnya supremasi hukum, akuntabilitas kekuasaan, partisipasi politik yang bermakna, serta penerimaan bersama terhadap aturan main demokrasi oleh seluruh aktor politik.<sup>5</sup> Namun, dinamika politik kontemporer yang dipengaruhi oleh arus digitalisasi sering kali memperlihatkan adanya ketegangan antara prosedur demokrasi dan substansi demokrasi itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana demokrasi Indonesia mampu beradaptasi dan tetap terkonsolidasi di tengah perubahan teknologi yang cepat.<sup>6</sup>

Selain itu, karakter masyarakat digital yang serba cepat, emosional, dan berbasis algoritma turut memengaruhi perilaku politik masyarakat. Diskursus politik di ruang digital kerap didominasi oleh narasi sensasional dibandingkan dengan argumentasi rasional, sehingga memengaruhi kualitas partisipasi politik warga negara. Situasi tersebut menuntut kehadiran negara dan aktor politik yang tidak hanya adaptif secara teknologi, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi, etika politik, dan literasi digital masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, politik digital di Indonesia telah menunjukkan ambivalensi yang kuat. Di satu sisi, ruang digital memperluas partisipasi politik masyarakat, khususnya kelompok muda, melalui berbagai bentuk ekspresi politik seperti kampanye daring, diskusi publik, dan gerakan sosial berbasis media sosial. Fenomena ini memperlihatkan adanya potensi demokratisasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Namun di sisi lain, ruang digital juga kerap dimanfaatkan sebagai instrumen mobilisasi politik yang bersifat manipulatif, eksklusif, dan

---

<sup>1</sup> Burhan Bungin, "Demokrasi Digital dan Media Sosial dalam Komunikasi Politik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 22, No. 1 (2018), 1–14.

<sup>2</sup> Yochai Benkler, *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom* (New Haven: Yale University Press, 2006), 212–218.

<sup>3</sup> Firman Noor, "Media Sosial dan Transformasi Politik di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* Vol 15, No. 2 (2018), 197–214.

<sup>4</sup> Pippa Norris, *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 98–104.

<sup>5</sup> Juan J. Linz dan Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996), 5–15.

<sup>6</sup> Firman Noor, "Tantangan Konsolidasi Demokrasi Indonesia di Era Digital," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 24, No. 2 (2021), 143–158.

<sup>7</sup> UNESCO, *Media and Information Literacy: Reinforcing Human Rights, Countering Radicalization and Extremism* (Paris: UNESCO Publishing, 2016), 18–25.

polaritatif. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta eksploitasi identitas primordial dalam kontestasi politik menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi.<sup>8</sup>

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Konsolidasi demokrasi menuntut adanya kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai demokrasi, kepatuhan terhadap aturan main politik, serta penguatan institusi demokratis yang berfungsi secara efektif dan akuntabel. Namun, dinamika politik kontemporer yang dipengaruhi oleh logika algoritma media digital sering kali mendorong politik yang berorientasi pada popularitas sesaat, emosionalitas publik, dan polarisasi sosial. Akibatnya, substansi demokratis seperti rasionalitas politik, deliberasi publik yang sehat, dan kepercayaan antarwarga cenderung mengalami erosi.<sup>9</sup>

Lebih jauh, transformasi digital juga memengaruhi relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat sipil. Negara dihadapkan pada dilema antara menjaga kebebasan berekspresi di ruang digital dan memastikan ketertiban serta integritas demokrasi. Sementara itu, masyarakat sipil dituntut untuk memiliki kapasitas literasi digital yang memadai agar mampu berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab. Tanpa adanya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, ruang digital berpotensi menjadi arena yang justru melemahkan demokrasi alih-alih memperkuatnya.<sup>10</sup>

Dinamika politik Indonesia kontemporer di era digital menunjukkan perubahan yang sangat signifikan dalam cara politik dipraktikkan dan dipersepsikan oleh masyarakat. Ruang digital telah menjadi arena utama komunikasi dan kontestasi politik, yang tidak hanya melibatkan aktor politik formal, tetapi juga masyarakat luas dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam.<sup>11</sup> Namun, perubahan ini memunculkan sejumlah persoalan mendasar dalam praktik demokrasi. Politik digital sering kali ditandai oleh penyederhanaan isu-isu kompleks, dominasi narasi emosional, serta maraknya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya kualitas diskursus publik dan melemahnya rasionalitas politik masyarakat, yang merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat.<sup>12</sup>

Masalah lain yang mengemuka adalah meningkatnya polarisasi politik yang dipicu oleh algoritma media sosial dan eksploitasi identitas dalam kontestasi politik. Polarisasi ini tidak hanya terjadi pada tingkat elite politik, tetapi juga merembes ke dalam relasi sosial masyarakat, sehingga mengancam kohesi sosial dan memperlemah kepercayaan antarwarga negara. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi menghambat proses konsolidasi demokrasi yang menuntut adanya penerimaan bersama terhadap nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan legitimasi institusi politik. Demokrasi yang hanya berjalan secara prosedural tanpa dukungan budaya politik yang demokratis berisiko kehilangan substansi dan daya tahan.<sup>13</sup>

Selain itu, digitalisasi politik juga menimbulkan persoalan dalam relasi antara negara dan warga negara. Negara dihadapkan pada dilema antara menjamin kebebasan berekspresi di ruang digital dan menjaga ketertiban serta integritas demokrasi. Ketidaksiapan regulasi dan lemahnya penegakan hukum di ruang digital sering kali memperburuk situasi, sehingga membuka ruang bagi manipulasi opini publik dan praktik politik yang tidak etis. Di sisi lain, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat turut memperparah kerentanan terhadap

<sup>8</sup> Burhan Bungin, "Hoaks, Polarisasi Politik, dan Tantangan Demokrasi Digital di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* Vol 18, No. 2 (2021), 155–170.

<sup>9</sup> Cass R. Sunstein, *Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media* (Princeton: Princeton University Press, 2017), 85–95.

<sup>10</sup> Burhan Bungin, "Literasi Digital dan Tantangan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 25, No. 1 (2022), 1–15.

<sup>11</sup> Merlyna Lim, "Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia," *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (2013): 636–657.

<sup>12</sup> Urgan Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge: Polity Press, 1989), 136–142.

<sup>13</sup> Larry Diamond, "Democracy's Deepening Crisis," *Journal of Democracy* Vol 26, No. 1 (2015): 141–155.

disinformasi dan propaganda politik, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas partisipasi politik.<sup>14</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Secara akademis, kajian ini penting untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana dinamika politik digital memengaruhi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks negara demokrasi yang masih berkembang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam menjelaskan interaksi antara teknologi digital, aktor politik, dan institusi demokrasi yang belum sepenuhnya mapan.<sup>15</sup>

Secara praktis, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan dasar analitis yang kuat bagi perumusan kebijakan publik dan strategi penguatan demokrasi di era digital.<sup>16</sup> Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi negara, aktor politik, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus berorientasi pada penguatan nilai-nilai demokrasi substantif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara ilmiah, tetapi juga memiliki signifikansi strategis dalam menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia di tengah arus digitalisasi politik yang semakin intensif.<sup>17</sup>

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika politik Indonesia kontemporer serta tantangan konsolidasi demokrasi di era digital, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis makna, pola, dan relasi yang muncul dari praktik politik digital, baik pada level aktor politik, institusi, maupun masyarakat.<sup>18</sup>

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis secara interpretatif dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori yang digunakan. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dinamika politik digital serta mengungkap tantangan struktural dan kultural dalam konsolidasi demokrasi Indonesia.<sup>19</sup> Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika politik Indonesia kontemporer serta tantangan konsolidasi demokrasi di era digital, sehingga hasil penelitian tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi pengembangan demokrasi yang lebih substantif dan berkelanjutan.<sup>20</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik Indonesia kontemporer di era digital ditandai oleh pergeseran signifikan dalam pola komunikasi dan partisipasi politik. Media digital, khususnya media sosial, telah menjadi ruang utama bagi penyampaian pesan

---

<sup>14</sup> Renee Hobbs, *Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom* (Thousand Oaks: Corwin Press, 2011), 112–120.

<sup>15</sup> Yanuar Nugroho, “Digitalisasi Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 7, no. 2 (2018): 85–98.

<sup>16</sup> Rina Martini, “Politik Digital dan Kebijakan Publik di Indonesia,” *Jurnal Administrasi Negara* 25, no. 1 (2019): 33–48.

<sup>17</sup> Ahmad Zainuddin, *Politik Media Sosial dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia* (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2020), 112–125.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

<sup>19</sup> Firman Noor, “Pendekatan Kualitatif dalam Studi Politik dan Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 8–15.

<sup>20</sup> Ahmad Fauzi, *Politik Digital dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 55–63.

politik, pembentukan opini publik, dan mobilisasi dukungan politik. Perubahan ini mendorong meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam wacana politik, terutama dari kelompok muda dan masyarakat urban, yang sebelumnya relatif kurang terlibat dalam ruang politik formal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa digitalisasi politik memberikan kontribusi ganda terhadap praktik demokrasi. Di satu sisi, ruang digital memperluas akses informasi politik dan membuka peluang partisipasi yang lebih inklusif. Namun di sisi lain, ruang digital turut memunculkan berbagai persoalan seperti maraknya disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang berimplikasi pada menurunnya kualitas diskursus publik. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya opini politik yang cenderung emosional dan polaritatif, sehingga menghambat deliberasi demokratis yang rasional. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa polarisasi politik berbasis identitas menjadi fenomena yang semakin menguat dalam dinamika politik digital di Indonesia. Polarisasi ini tidak hanya tercermin dalam kontestasi elektoral, tetapi juga dalam relasi sosial masyarakat secara lebih luas. Fragmentasi sosial yang terjadi berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan memperlambat proses konsolidasi demokrasi yang menuntut stabilitas sosial dan politik.

Dari sisi kelembagaan, penelitian ini menemukan bahwa institusi politik, termasuk partai politik dan lembaga negara, belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan politik digital. Pemanfaatan media digital oleh aktor politik masih cenderung bersifat pragmatis dan berorientasi jangka pendek, terutama untuk kepentingan elektoral. Akibatnya, fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan penguatan institusi demokrasi belum berjalan secara optimal di ruang digital. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan negara terkait ruang digital masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ketidakseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan penegakan hukum di ruang digital menimbulkan dilema dalam praktik demokrasi. Lemahnya literasi digital masyarakat turut memperbesar kerentanan terhadap manipulasi politik dan penyalahgunaan informasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik Indonesia kontemporer di era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi konsolidasi demokrasi. Digitalisasi politik berpotensi memperkuat demokrasi apabila dikelola secara etis dan institusional, namun juga dapat menjadi faktor penghambat konsolidasi demokrasi apabila tidak diimbangi dengan penguatan regulasi, literasi digital, dan komitmen aktor politik terhadap nilai-nilai demokrasi.

## **Pembahasan**

Dinamika politik Indonesia kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi digital yang secara signifikan mengubah pola komunikasi politik dan relasi kekuasaan. Media digital, khususnya media sosial, telah menjadi ruang baru bagi interaksi antara aktor politik dan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi politik tidak lagi bersifat satu arah, melainkan berlangsung secara interaktif dan real time. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya partisipasi politik masyarakat, terutama generasi muda, yang sebelumnya relatif terpinggirkan dari ruang politik formal. Namun demikian, keterbukaan ruang digital juga menghadirkan tantangan serius bagi kualitas demokrasi.<sup>21</sup>

Salah satu dinamika utama politik kontemporer di era digital adalah menguatnya politik berbasis narasi dan citra. Aktor politik cenderung membangun popularitas melalui strategi komunikasi yang menekankan aspek emosional dan simbolik dibandingkan dengan gagasan dan program yang substantif.<sup>22</sup> Algoritma media sosial turut memperkuat kecenderungan ini

---

<sup>21</sup> Yanuar Nugroho, "Media Digital dan Tantangan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Komunikasi Indonesia* Vol 8, No. 2 (2019), 95–108.

<sup>22</sup> Nyarwi Ahmad, "Politik Pencitraan dalam Kontestasi Elektoral di Indonesia," *Jurnal Politik* Vol 6, No. 1 (2020), 45–60.

dengan memprioritaskan konten yang bersifat provokatif dan sensasional. Akibatnya, diskursus politik publik sering kali mengalami penyederhanaan isu dan polarisasi pandangan, yang berdampak pada melemahnya rasionalitas dan kualitas deliberasi demokratis.

Fenomena disinformasi dan hoaks politik menjadi tantangan lain yang signifikan dalam dinamika politik digital di Indonesia. Penyebaran informasi yang tidak akurat dan manipulatif tidak hanya merusak kualitas pengetahuan politik masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi preferensi politik secara tidak sehat. Dalam konteks konsolidasi demokrasi, kondisi ini sangat problematis karena demokrasi yang terkonsolidasi mensyaratkan warga negara yang memiliki informasi memadai dan mampu membuat keputusan politik secara rasional. Ketika ruang publik dipenuhi oleh disinformasi, legitimasi proses demokrasi dapat tergerus.<sup>23</sup>

Selain itu, dinamika politik digital juga ditandai oleh meningkatnya polarisasi politik berbasis identitas. Kontestasi politik di ruang digital sering kali memanfaatkan sentimen identitas, baik agama, etnis, maupun kelompok sosial tertentu, sebagai alat mobilisasi dukungan. Polarisasi yang terbentuk tidak hanya bersifat elektoral, tetapi juga sosial, sehingga menciptakan fragmentasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi yang menuntut adanya kohesi sosial dan penerimaan bersama terhadap keberagaman dalam kerangka demokratis.<sup>24</sup>

Dalam perspektif konsolidasi demokrasi, tantangan tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari institusi politik dan negara. Negara dihadapkan pada dilema antara menjaga kebebasan berekspresi dan mengatur ruang digital agar tidak merusak tatanan demokrasi. Regulasi yang lemah atau tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan media digital untuk kepentingan politik sempit. Sebaliknya, regulasi yang terlalu represif berpotensi mengancam kebebasan sipil dan prinsip demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan dan regulasi menjadi isu krusial dalam dinamika politik kontemporer.<sup>25</sup> Di sisi lain, peran masyarakat sipil menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan demokrasi digital. Penguatan literasi digital dan etika politik di ruang publik merupakan prasyarat utama bagi terciptanya demokrasi yang substansial. Masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap informasi politik akan lebih mampu berpartisipasi secara konstruktif dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, konsolidasi demokrasi tidak hanya bergantung pada institusi formal, tetapi juga pada budaya politik masyarakat yang mendukung nilai-nilai demokrasi.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, dinamika politik Indonesia kontemporer di era digital memperlihatkan adanya paradoks demokrasi. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang bagi partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif. Di sisi lain, berbagai tantangan seperti disinformasi, polarisasi, dan degradasi kualitas diskursus publik berpotensi melemahkan proses konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, penguatan demokrasi Indonesia di era digital memerlukan upaya bersama yang melibatkan negara, aktor politik, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi benar-benar berkontribusi pada demokrasi yang lebih matang dan berkelanjutan.<sup>27</sup>

Dinamika politik digital juga memunculkan perubahan signifikan dalam pola kepemimpinan dan relasi antara elite politik dan konstituen. Di era digital, kepemimpinan politik semakin dituntut untuk bersifat komunikatif, responsif, dan adaptif terhadap aspirasi

<sup>23</sup> Burhan Bungin, "Hoaks Politik, Opini Publik, dan Krisis Rasionalitas Demokrasi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 23, No. 2 (2019), 85–100.

<sup>24</sup> Burhan Bungin, "Hoaks Politik, Opini Publik, dan Krisis Rasionalitas Demokrasi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 23, No. 2 (2019), 85–100.

<sup>25</sup> Gun Gun Heryanto, *Demokrasi Digital dan Etika Politik Media Sosial* (Jakarta: LP3ES, 2020), 88–95.

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 463–470.

<sup>27</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 175–182.

publik yang berkembang secara cepat di ruang digital. Namun, tuntutan ini sering kali mendorong lahirnya gaya kepemimpinan populis yang lebih mengutamakan popularitas dan pencitraan dibandingkan dengan penguatan institusi demokrasi. Dalam konteks konsolidasi demokrasi, kecenderungan ini berpotensi melemahkan institusionalisasi politik dan menggeser fokus demokrasi dari penguatan sistem menuju personalisasi kekuasaan.<sup>28</sup>

Selain itu, peran aktor non-negara dalam politik digital semakin menguat. Influencer politik, buzzer, dan jaringan relawan daring menjadi aktor penting dalam pembentukan opini publik. Kehadiran aktor-aktor ini sering kali beroperasi di luar mekanisme akuntabilitas politik yang jelas, sehingga menyulitkan publik untuk membedakan antara partisipasi politik yang autentik dan manipulasi opini. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi di era digital tidak hanya menghadapi tantangan institusional, tetapi juga tantangan etis dan normatif dalam praktik komunikasi politik.<sup>29</sup>

Dari sisi kelembagaan, partai politik sebagai pilar utama demokrasi juga menghadapi tantangan serius dalam menyesuaikan diri dengan perubahan politik digital. Banyak partai politik yang masih memanfaatkan media digital sebatas sebagai alat kampanye elektoral, tanpa mengembangkan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi yang berkelanjutan. Akibatnya, partai politik cenderung kehilangan peran strategisnya sebagai mediator antara negara dan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap partai politik, yang merupakan indikator penting dalam proses konsolidasi demokrasi.<sup>30</sup>

Lebih jauh, dinamika politik digital juga memberikan implikasi signifikan terhadap proses pembuatan kebijakan publik. Arus opini publik yang terbentuk secara cepat dan masif di media sosial sering kali mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan yang bersifat reaktif dan berorientasi jangka pendek. Meskipun partisipasi publik merupakan elemen esensial dalam demokrasi, dominasi opini yang tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional, data yang akurat, dan deliberasi yang memadai berpotensi menurunkan kualitas kebijakan publik.<sup>31</sup> Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan akuntabilitas pemerintahan serta efektivitas penyelenggaraan demokrasi substantif.<sup>31</sup>

Dalam kerangka konsolidasi demokrasi, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi politik tidak bersifat netral. Teknologi digital dapat menjadi instrumen penguatan demokrasi apabila dikelola secara etis dan institusional, namun juga dapat menjadi faktor yang memperdalam krisis demokrasi apabila dimanfaatkan secara eksploitatif. Oleh karena itu, konsolidasi demokrasi di era digital menuntut penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi digital masyarakat, serta komitmen aktor politik terhadap etika demokrasi dan supremasi hukum.<sup>32</sup>

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam dinamika politik Indonesia kontemporer di era digital adalah perubahan dalam pola partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik tidak lagi terbatas pada keikutsertaan dalam pemilu atau aktivitas politik formal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ekspresi politik di ruang digital seperti petisi daring, kampanye hashtag, dan diskusi politik di media sosial. Bentuk partisipasi ini mencerminkan adanya perluasan ruang partisipasi demokratis. Namun, partisipasi digital yang bersifat instan dan simbolik sering kali tidak berujung pada keterlibatan politik yang berkelanjutan, sehingga berpotensi menciptakan ilusi partisipasi tanpa kontribusi nyata terhadap penguatan demokrasi.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 471–478.

<sup>29</sup> Ugen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge: Polity Press, 1989), 181–190.

<sup>30</sup> Syamsuddin Haris, *Partai Politik dan Parlemen di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 133–140.

<sup>31</sup> Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), 64–70.

<sup>32</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 221–228.

<sup>33</sup> Henrik Bang, "Political Participation in the Digital Age," *Policy & Politics* Vol 33, No. 2 (2005), 255–272.

Di samping itu, dinamika politik digital turut memengaruhi relasi kekuasaan antara pusat dan daerah. Informasi dan isu politik lokal dapat dengan cepat memperoleh perhatian nasional melalui media digital, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Akan tetapi, kondisi ini juga dapat menimbulkan distorsi informasi apabila isu lokal disajikan secara tidak utuh atau dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks konsolidasi demokrasi, keseimbangan antara keterbukaan informasi dan akurasi menjadi faktor penting agar demokrasi tidak terjebak dalam sensasionalisme politik.<sup>34</sup> Dinamika politik digital juga berdampak pada supremasi hukum dan penegakan hukum dalam sistem demokrasi. Pelanggaran hukum di ruang digital, seperti ujaran kebencian dan penyebaran hoaks, sering kali sulit ditangani secara efektif karena keterbatasan regulasi dan kapasitas penegak hukum. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan memperlemah legitimasi negara. Padahal, konsolidasi demokrasi mensyaratkan adanya kepastian hukum dan keadilan yang dirasakan oleh seluruh warga negara.<sup>35</sup>

Dalam konteks ini, peran pendidikan politik dan literasi digital menjadi sangat krusial. Pendidikan politik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban politiknya secara lebih kritis. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk menilai kebenaran informasi, memahami konteks politik, dan bersikap etis dalam berinteraksi di ruang publik digital.<sup>36</sup> Tanpa penguatan aspek ini, ruang digital akan terus menjadi medan yang rentan terhadap manipulasi politik. Secara reflektif, dinamika politik Indonesia kontemporer di era digital memperlihatkan bahwa konsolidasi demokrasi tidak dapat dicapai hanya melalui mekanisme institusional formal. Demokrasi yang terkonsolidasi memerlukan sinergi antara institusi negara yang kuat, aktor politik yang beretika, serta masyarakat yang memiliki kesadaran dan kapasitas demokratis. Ruang digital, dalam hal ini, harus dipahami sebagai bagian integral dari ruang publik demokratis yang memerlukan tata kelola yang adil dan partisipatif.<sup>37</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika politik Indonesia kontemporer di era digital ditandai oleh perubahan mendasar dalam pola komunikasi politik, partisipasi masyarakat, dan pembentukan opini publik. Ruang digital telah menjadi arena strategis bagi kontestasi politik yang memperluas akses partisipasi dan mempercepat arus informasi politik. Namun demikian, digitalisasi politik tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga memunculkan tantangan serius bagi kualitas dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi politik melalui media digital belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan rasionalitas diskursus publik. Maraknya disinformasi, hoaks, serta polarisasi politik berbasis identitas cenderung melemahkan kualitas deliberasi demokratis dan mengganggu kohesi sosial. Kondisi ini berdampak langsung pada proses konsolidasi demokrasi, yang tidak hanya menuntut keberlangsungan prosedur demokrasi, tetapi juga penguatan nilai, institusi, dan budaya politik yang demokratis. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa institusi politik dan regulasi negara masih menghadapi keterbatasan dalam merespons dinamika politik digital secara komprehensif. Pemanfaatan ruang digital oleh aktor politik masih dominan bersifat pragmatis dan elektoral, sementara fungsi pendidikan politik dan penguatan kelembagaan belum berjalan optimal. Di sisi lain,

---

<sup>34</sup> Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms* (Cambridge: Polity Press, 1996), 359–366.

<sup>35</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 89–96.

<sup>36</sup> Herlambang P. Wiratraman, “Literasi Digital dan Tantangan Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 257–275.

<sup>37</sup> Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms* (Cambridge: Polity Press, 1996), 359–366.

rendahnya literasi digital sebagian masyarakat memperbesar kerentanan terhadap manipulasi politik dan penyalahgunaan informasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia di era digital memerlukan pengelolaan ruang digital yang etis dan berkeadilan, penguatan literasi digital masyarakat, serta komitmen kuat aktor politik terhadap nilai-nilai demokrasi substantif. Tanpa upaya tersebut, demokrasi berisiko berjalan secara prosedural semata tanpa penguatan substansi yang menjamin kualitas dan keberlanjutannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Nyarwi "Politik Pencitraan dalam Kontestasi Elektoral di Indonesia," *Jurnal Politik* Vol 6, No. 1 (2020).
- Alfred Stepan, Juan J. Linz, *Problems of Democratic Transition and Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996).
- Bang, Henrik "Political Participation in the Digital Age," *Policy & Politics* Vol 33, No. 2 (2005).
- Benkler Yochai, *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom* (New Haven: Yale University Press, 2006).
- Budiardjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Budiardjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Bungin Burhan, "Demokrasi Digital dan Media Sosial dalam Komunikasi Politik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 22, No. 1 (2018).
- Bungin, Burhan "Hoaks Politik, Opini Publik, dan Krisis Rasionalitas Demokrasi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 23, No. 2 (2019).
- Bungin, Burhan "Hoaks, Polarisasi Politik, dan Tantangan Demokrasi Digital di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* Vol 18, No. 2 (2021).
- Cass R. Sunstein, "Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media" (Princeton: Princeton University Press, 2017).
- Diamond, Larry "Democracy's Deepening Crisis," *Journal of Democracy* Vol 26, No. 1 (2015).
- Diamond, Larry *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999).
- Fauzi, Ahmad *Politik Digital dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).
- Habermas, Jürgen *Between Facts and Norms* (Cambridge: Polity Press, 1996).
- Habermas, Jürgen *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge: Polity Press, 1989).
- Habermas, Jürgen *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge: Polity Press, 1989)
- Haris, Syamsuddin *Partai Politik dan Parlemen di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)
- Herlambang P. Wiratraman, "Literasi Digital dan Tantangan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).
- Heryanto, Gun *Gun Demokrasi Digital dan Etika Politik Media Sosial* (Jakarta: LP3ES, 2020)
- Hobbs, Renee *Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom* (Thousand Oaks: Corwin Press, 2011).
- Lim, Merlyna "Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia," *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (2013).
- M. Gaffar, *Janedjri Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)
- M. Gaffar, *Janedjri Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Martini, Rina "Politik Digital dan Kebijakan Publik di Indonesia," *Jurnal Administrasi Negara* 25, no. 1 (2019).
- Noor Firman, "Media Sosial dan Transformasi Politik di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* Vol 15, No. 2 (2018).
- Noor, Firman "Pendekatan Kualitatif dalam Studi Politik dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019).
- Norris Pippa, *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited* (Cambridge: Cambridge University Press,

- 2011).
- Nugroho, Yanuar “Digitalisasi Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 7, no. 2 (2018).
- Nugroho, Yanuar “Media Digital dan Tantangan Demokrasi Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Indonesia* Vol 8, No. 2 (2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- UNESCO, *Media and Information Literacy: Reinforcing Human Rights, Countering Radicalization and Extremism* (Paris: UNESCO Publishing, 2016).
- Zainuddin, Ahmad *Politik Media Sosial dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia* (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2020).